

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi saat ini telah membawa dampak yang besar pada bidang administrasi pemerintahan. Digitalisasi dalam pengelolaan data menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, terutama dalam pelayanan publik (Lestari & Susanti, 2021). Salah satu aspek yang terdampak digitalisasi adalah pengelolaan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Politik (Orpol). Sistem informasi yang terpusat juga dinilai efektif dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya dan menjaga keamanan data lembaga pemerintah (Dongak et al., 2020). Selain itu, tata kelola data yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan kualitas data yang dimiliki instansi pemerintah. Praktik tata kelola data yang efektif secara langsung mempengaruhi kinerja organisasi, seperti yang terlihat di berbagai institusi keuangan maupun pemerintahan (Panggabean & Nasution, 2023). Oleh karena itu, sistem informasi yang terintegrasi, akuntabel, dan mudah digunakan sangat dibutuhkan untuk mendukung fungsi pelayanan publik.

Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DIY mengembangkan SIKRESNO (Sistem Kendali Registrasi Organisasi Masyarakat dan Politik), sebuah sistem informasi berbasis web yang dimaksud untuk mempermudah proses registrasi dan pelaporan Ormas maupun organisasi politik (Orpol). Dalam pengelolaan sistem ini, Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) di Bakesbangpol DIY memiliki tugas dan fungsi dalam mengawasi pendaftaran serta kelengkapan administrasi Ormas dan Orpol (*Kesbangpol DIY*, n.d.). Pengembangan dan pelaksanaan sistem ini telah memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang pengembangan sistem informasi Ormas, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 73 Tahun 2022 terkait Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan utama dalam pengembangan dan

operasionalisasi SIKRESNO sebagai sistem yang terintegrasi untuk mendukung tata kelola, registrasi, dan pengawasan organisasi secara lebih efektif dan transparan.

Namun demikian, meskipun sistem SIKRESNO telah diimplementasikan, masih ditemukan sejumlah kendala, terutama terkait tingkat kepatuhan Ormas dalam melakukan registrasi. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), terdapat lebih dari 5.000 Ormas berbadan hukum di Yogyakarta, namun hingga saat ini baru sekitar 800 Ormas yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dalam sistem pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 4.200 Ormas belum tercatat secara resmi, yang berdampak pada kurang optimalnya pemantauan dan pengelolaan data organisasi oleh pemerintah daerah (Faradilla et al., 2021)

Keberhasilan implementasi sistem informasi tidak hanya bergantung pada tersedianya teknologi, tetapi juga ditentukan oleh kualitas sistem, kemudahan penggunaan, serta dampaknya terhadap peningkatan kinerja organisasi (Mamma, 2023). Selain itu, tantangan seperti hambatan teknis, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya pelatihan bagi pengguna turut mempengaruhi efektivitas penerapan sistem informasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan SIKRESNO untuk memastikan bahwa sistem tersebut benar-benar mampu mendukung tujuan pengelolaan dan pemberdayaan Ormas secara optimal. Sejauh ini, penelitian yang secara khusus membahas pengaruh penerapan sistem informasi SIKRESNO terhadap efektivitas pengelolaan data organisasi masyarakat di DIY masih sangat terbatas. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai manfaat, tantangan, serta dampak sistem terhadap kinerja pengelolaan data Ormas, sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk pengembangan sistem, peningkatan kualitas layanan publik, serta pengambilan kebijakan berbasis data oleh Bakesbangpol DIY.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi Sistem Kendali Registrasi Organisasi Masyarakat dan

Politik (SIKRESNO) terhadap Efektivitas Pengelolaan Data Ormas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Masalah dalam penelitian ini berfokus pada efektivitas pengelolaan data organisasi masyarakat setelah diterapkannya sistem informasi SIKRESNO.

1.3 BATASAN MASALAH

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta (Bakesbangpol DIY) sebagai instansi yang menggunakan Sistem Informasi SIKRESNO.
2. Responden dalam penelitian ini hanya difokuskan pada pihak internal, yaitu pimpinan dan pegawai Bakesbangpol DIY.
3. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis sistem, melainkan hanya berfokus pada penerapan sistem dan pengaruhnya terhadap efektivitas pengelolaan data.

1.4 PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana pengaruh implementasi Sistem Kendali Registrasi Organisasi Masyarakat dan Politik (SIKRESNO) terhadap efektivitas pengelolaan data di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta (BAKESBANGPOL DIY)?
2. Faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan data organisasi masyarakat (ormas) melalui sistem SIKRESNO di BAKESBANGPOL DIY?
3. Apa hambatan yang dihadapi dalam implementasi sistem SIKRESNO?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan sistem informasi SIKRESNO yang telah digunakan sejak tahun 2023 terhadap efektivitas pengelolaan data organisasi masyarakat di lingkungan Bakesbangpol DIY. Agar dapat memberikan evaluasi seberapa efektif SIKRESNO dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan data ormas termasuk registrasi dan pelaporan. Dengan

tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mendukung proses administrasi layanan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.6 MANFAAT HASIL PENELITIAN

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat secara nyata dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang sistem informasi dan manajemen data dalam sektor pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar melakukan evaluasi dan masukan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY dalam meningkatkan efektivitas penggunaan SIKRESNO dalam pengelolaan data organisasi masyarakat.